

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYUSUNAN DOKUMEN PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN BULAKAMBA TANJUNG, KABUPATEN BREBES**

Ketua Tim:

Mustovia Azahro, S.T., M.T. (NIP. 120150503)

Anggota:

Mustovia Azahro, S.T., M.T. (NIP. 120150503)

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN


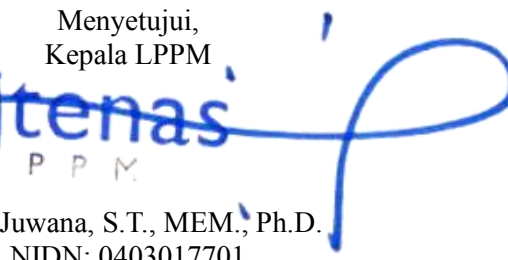
1.	Judul	: Penyusunan Dokumen Profil Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Bulakamba Tanjung, Kabupaten Brebes
2.	Ketua Tim Pengusul	
	NIDIN/NIDK	: 120150503/0402079101
	Nama Lengkap (beserta gelar)	: MUSTOVIA AZAHRO, ST., MT.
	Pangkat/Golongan	: Asisten Ahli/ IIIB
	Jenis Kelamin	: Perempuan
	Jurusan/Prodi	: Perencanaan Wilayah dan Kota
	Bidang Keahlian	: Ruang Kota dan Aktivitas
	Alamat Kantor	: Jl. PH.H. Mustofa No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124
	Telp/Faks Kantor	: (022) 7272215
	Alamat Rumah	: Griya Asri Pasirwangi Blok D/8, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40618
	Nomor HP/WA	: 0821 11691525
	E-mail	: mustovia.azahro@itenas.ac.id
	ID Sinta	: 6178742
2.	Nama Mitra	: CV. Reka Inti Sarana
	Lokasi Kegiatan	
	Wilayah Mitra (Desa/Kelurahan)	: Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung
	Kabupaten/Kota	: Kabupaten Brebes
	Provinsi	: Jawa Tengah
	Jarak PT ke lokasi mitra (km)	: 266 km
5.	Luaran yang dihasilkan	: Dokumen
6.	Jangka waktu pelaksanaan	: 1 bulan (Juni 2020)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.
NIP/NIDN: 0412017610

Ketua Tim Pengusul,


Mustovia Azahro, S.T., M.T.
NIP/NIDN: 0402079101

Menyetujui,
Kepala LPPM
 
Iwan Juwana, S.T., MEM., Ph.D.
NIDN: 0403017701

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Persoalan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan dan cukup banyak menuai polemik dikarenakan upaya penanganan kumuh yang dilakukan ternyata berbanding lurus dengan berkembangnya kawasan permukiman kumuh serta munculnya kawasan-kawasan kumuh yang baru. Untuk itu dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh perkotaan memerlukan perencanaan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2018 telah menetapkan SK Bupati Nomor 050/678 Tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Brebes dengan jumlah kawasan kumuh seluas 778,04 hektare yang terdapat di 39 (tiga puluh sembilan) kawasan di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Brebes. SK Bupati tentang perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang baru diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan permukiman di Kabupaten Brebes sehingga upaya pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Brebes dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pada laporan ini, akan dibahas mengenai salah satu kawasan kumuh perkotaan Bulakamba-Tanjung yang terdiri dari 12 desa pada 2 (dua) kawasan dengan luas kawasan permukiman 77,33 hektare, yakni, 10 Desa di Kawasan Tanjung; dan 2 Desa di Kawasan Bulakamba. Kegiatan Penyusunan Database Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Bulakamba-Tanjung Kabupaten Brebes akan membahas mengenai profil dan data aspek kekumuhan, perhitungan bobot setiap aspek kekumuhan, perhitungan detail rencana anggaran dan biaya penanganan kumuh, serta penyusunan skala prioritas penanganan kumuh.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen database kawasan permukiman kumuh perkotaan Bulakamba-Tanjung yang meliputi profil dan data aspek kekumuhan, perhitungan bobot setiap aspek kekumuhan, perhitungan rencana anggaran dan biaya penanganan kumuh, serta penyusunan skala prioritas penanganan kumuh. Output yang dihasilkan berupa dokumen yang memuat informasi mengenai prioritasi penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang akan menjadi pedoman dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Laporan ini memiliki substansi yang tertuang dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, yang meliputi :

- Profil dan data aspek kekumuhan, yang meliputi:
 - Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung : a) ketidakteraturan bangunan; b) tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; c) kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
 - Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan : a) jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan; b) kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

- kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan : a) drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air; b) ketidaktersediaan drainase; c) tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan; d) tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; e) kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
 - Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah : a) sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; b) prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
 - Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan : a) prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; b) sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; c) tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase
 - Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi proteksi kebakaran : a) ketersediaan system proteksi secara aktif dan pasif; b) ketidaktersediaan sarana proteksi kebarakaran
 - Sarana dan prasarana utilitas permukiman dan lain-lain yang relevan dengan kondisi kekumuhan kawasan
- perhitungan bobot setiap aspek kekumuhan untuk mengklasifikasikan perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
 - perhitungan rencana anggaran dan biaya penanganan kawasan kumuh,
 - penyusunan skala prioritas penanganan kumuh

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah kajian dalam kegiatan ini adalah kawasan permukiman kumuh Perkotaan Bulakamba-Tanjung. Kawasan permukiman kumuh perkotaan Bulakamba-Tanjung terdiri dari 14 (empat belas) desa antara lain:

Tabel 0-1 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Bulakamba-Tanjung

No	Kawasan	Desa	Luasan Kumuh (Ha)
1	Tanjung Tengah	1.Kramat Sampang	3,85
		2.Sengon	3,38
		3. Lemah Abang	6,35
	Jumlah		13,68
2	Tanjung Barat	1.Tanjung	8,17
		2.Tengguli	5,89
		3.Kedawung	6,87
	Jumlah		20,93
3	Tanjung Timur	1.Pejagan	10,45
		2.Tegongan	4,81
		3.Kemurang Wetan	7,32
		4.Kemurang Kulon	5,64
	Jumlah		28,22
4	Bulakamba	1.Bulakamba	11,23
		2.Bulusari	3,27
	Jumlah		14,5
Luasan Total Kawasan Permukiman Kumuh			77,23

Sumber : SK Bupati Kabupaten Brebes, 2018

1.4 Metodologi Pekerjaan

Dalam penyusunan database ini akan dirumuskan tahapan kegiatan sebagai berikut,

1. Persiapan

Tahap persiapan yaitu tahapan dimana Tim Konsultan yang terdiri dari para ahli dibidangnya melaksanakan kajian teknis terhadap data awal perumahan dan permukiman beserta infrastruktur kawasan permukiman kumuh. Pada tahap ini juga dilaksanakan mobilisasi tenaga ahli dan

peralatan, perizinan survey, penyusunan format isian baseline sesuai sesuai Permen PU PR No 14 Tahun 2018 serta berkoordinasi dengan OPD terkait.

2. Tahap survey, observasi dan pendataan

Pada tahap ini dilakukan survey dan observasi lapangan serta melakukan pendataan dengan melihat kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh yang meliputi aspek;

- a. Rumah/Bangunan tempat tinggal,
- b. Jalan lingkungan,
- c. Drainase lingkungan,
- d. Layanan air minum
- e. Akses sanitasi,
- f. Pengelolaan persampahan,
- g. Pengamanan dari bahaya kebakaran,
- h. Sarana dan prasarana utilitas permukiman dan lain-lain.

3. Tahap Penyusunan rencana anggaran biaya antara lain :

- a. Menentukan aspek kekumuhan dan perhitungan bobot kekumuhan
- b. Membuat peta kekumuhan dan gambar-gambar teknik dan detail utilitas yang dibutuhkan untuk penanganan kumuh,
- c. Perhitungan rincian volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kekumuhan.

4. Tahap Penyusunan skala prioritas penanganan dan laporan akhir seperti :

- a. Memberikan rekomendasi penentuan skala prioritas untuk mempercepat pengentasan kekumuhan di lapangan.
- b. Penyampaian Laporan Akhir Perencanaan.
- c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan.

BAB 2

PROFIL KAWASAN KUMUH

2.1 Profil Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung

2.1.1 Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi perencanaan penyusunan database kawasan permukiman kumuh perkotaan terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kersana, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Bulakamba. Kecamatan Kersana memiliki Desa Kramat Sampang yang masuk dalam kawasan perkotaan Tanjung tepatnya pada Kawasan Tanjung Tengah. 9 (sembilan) desa di Kecamatan Tanjung yaitu Desa Sengon dan Lemah Abang yang termasuk dalam kawasan Tanjung Tengah, Desa Tanjung. Tengguli dan Kedawung yang masuk Kawasan Tanjung Barat, Desa Pejagan, Tegongan, Kemurang Wetan dan Kemurang Kulon yang termasuk dalam Kawasan Tanjung Timur. Adapun desa yang masuk dalam kawasan perkotaan Bulakamba adalah Desa Bulakamba dan Desa Bulusari.

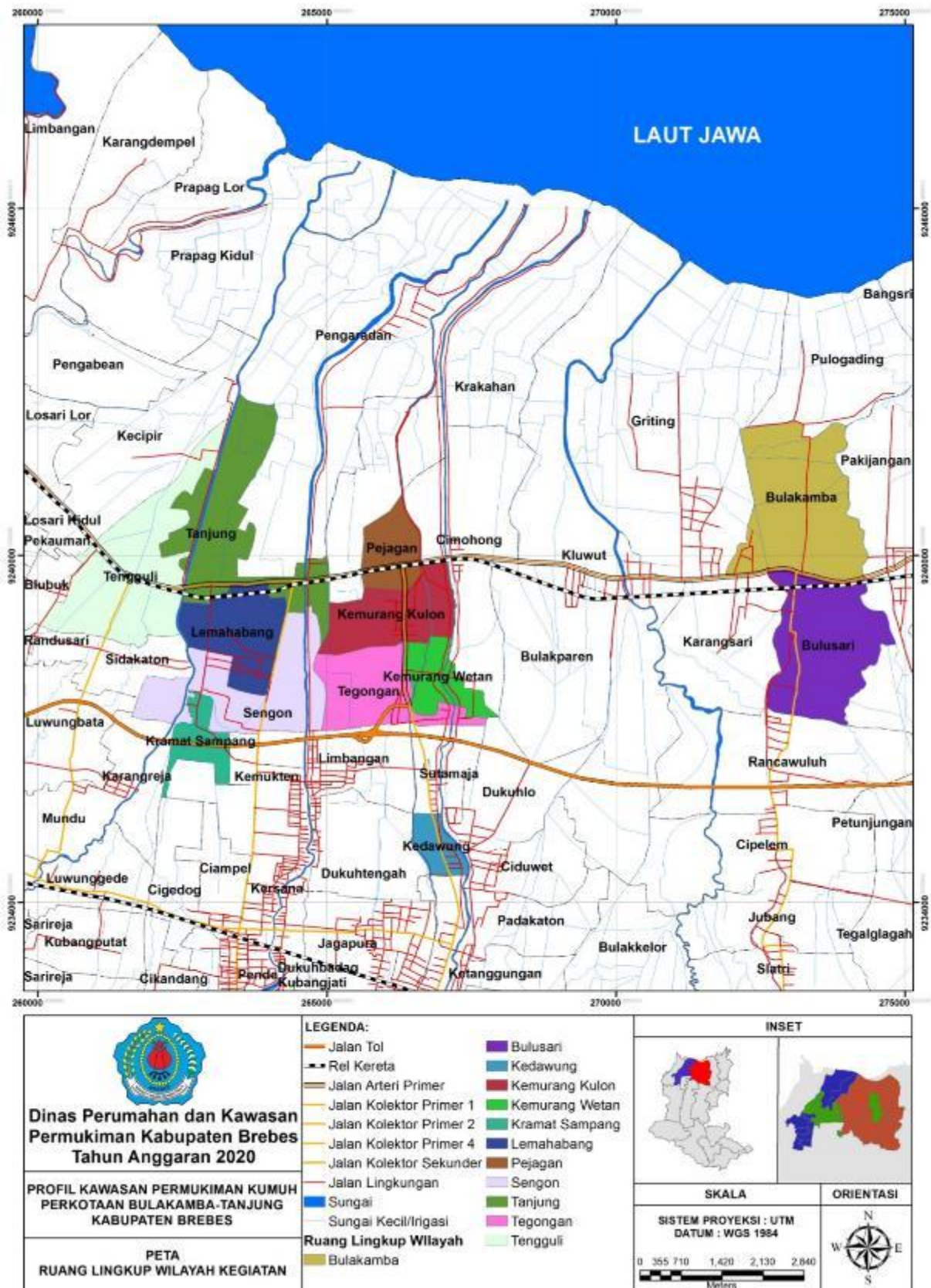
Desa yang memiliki permukiman kumuh dan menjadi bagian dalam Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung dikutip berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 050/678 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Brebes. Masing-masing desa tersebut terdiri dari beberapa perdukahan yang dibagi menjadi Rukun Warga (RW) hingga Rukun Tetangga (RT). Selain pembagian secara administratif, pembagian tersebut juga dapat mempermudah dalam melakukan deliniasi kawasan kumuh serta prioritas rencana penanganan kawasan permukiman kumuh.

Tabel 2-1 Administrasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Bulakamba-Tanjung

No	Desa	Administrasi Wilayah			Luas Wilayah Desa (Ha)
		Perdukahan	RT	RW	
A	Kawasan Tanjung Tengah				
	1.Kramat Sampang	-	19	5	95
	2.Sengon	3	57	9	352
	3. Lemah Abang	3	20	5	229
B					
	1.Tanjung	-	29	5	420
	2.Tengguli	2	17	6	455
	3.Kedawung	1	6	3	70
C	Kawasan Tanjung Timur				
	1.Pejagan	1	9	4	126
	2.Tegongan	2	16	5	233
	3.Kemurang Wetan	4	52	8	123
	4.Kemurang Kulon	1	23	5	227
D	Kawasan Bulakamba				
	1.Bulakamba	-	20	5	480
	2.Bulusari	-	47	11	397
JUMLAH			315	71	3207

Sumber: BPS Kabupaten Brebes dan Bappeda Kabupaten Brebes, 2019

Gambar 2-1 Peta Administrasi Wilayah Penanganan



Sumber: Bappeda Kabupaten Brebes, 2018

2.1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk pada wilayah penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Bulakamba-Tanjung mencapai 94.831 jiwa. Secara umum, rasio perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan relatif sama. Sedangkan persebaran jumlah penduduk terbesar berada di Desa Dukuh tengah yang mencapai 11.213 jiwa.

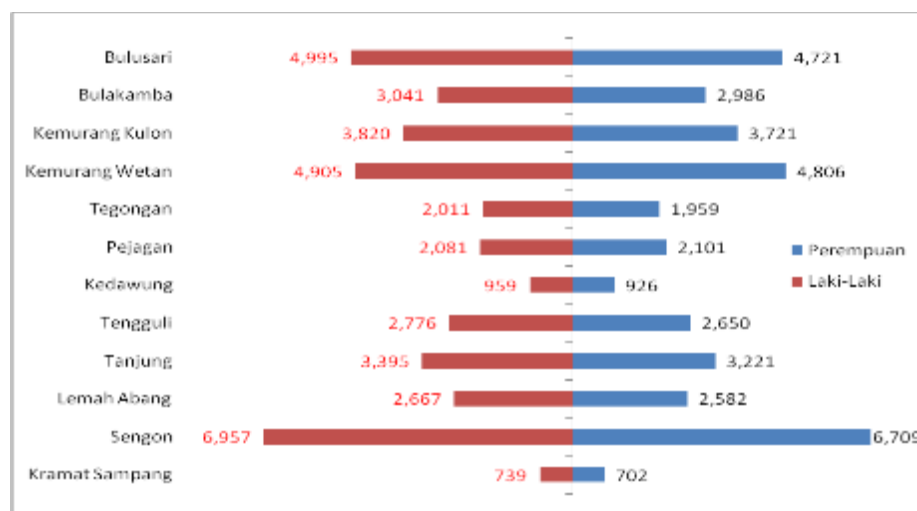
Tabel 2-2Penduduk Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	Kawasan Tanjung Tengah			
	1. Kramat Sampang	739	702	1.441
	2. Sengon	6.957	6.709	13.666
	3. Lemah Abang	2.667	2.582	5.249
B	Kawasan Tanjung Barat			
	1. Tanjung	3.395	3.221	6.616
	2. Tengguli	2.776	2.650	5.426
	3. Kedawung	959	926	1.885
C	Kawasan Tanjung Timur			
	1. Pejagan	2.081	2.101	4.182
	2. Tegongan	2.011	1.959	3.970
	3. Kemurang Wetan	4.905	4.806	9.711
	4. Kemurang Kulon	3.820	3.721	7.541
D	Kawasan Bulakamba			
	1. Bulakamba	3.041	2.986	6.027
	2. Bulusari	4.995	4.721	9.716

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

Berdasarkan tabel di atas, Desa Sengon di Kecamatan Tanjung merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak dengan 13.666 jiwa. Sedangkan Desa Kramatsampang di Kecamatan Kersana merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan 1.441 jiwa. Berikut gambar proporsi jumlah penduduk tiap desa,

Gambar 2-2 Proporsi Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Bulakamba



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2019

2.1.3 Penggunaan Lahan

Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak terlepas dari penggunaan lahan pada kawasan tersebut. Kawasan permukiman merupakan pusat aktivitas di dalam tata guna lahan. Semakin besar luas kawasan permukiman, maka semakin besar pula kegiatan aktivitas manusia. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap potensi kawasan tersebut menjadi suatu permukiman kumuh. Hal ini dapat dihindari

apabila dilakukan penataan guna lahan yang baik. Untuk menata penggunaan lahan dengan baik, maka diperlukan sarana-dan prasarana penunjang kegiatan perkotaan sehingga tidak terjadi *mixed use* pada penggunaan lahan yang dapat menyebabkan *urban sprawl* hingga menimbulkan *slum area*. Pada Kawasan Bulakamba-Tanjung yang dijadikan wilayah kajian, penggunaan lahan didominasi oleh penggunaan lahan pertanian berupa sawah irigasi dengan luas 1.685,83 Ha. Sedangkan penggunaan lahan permukiman memiliki luas 805,69 Ha. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-3 Luas Penggunaan Lahan di Kawasan Bulakamba-Tanjung

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Jaringan jalan aspal/beton/tanah	4,35
2	Kebun Campuran	16,48
3	Ladang/Tegalan	146,18
4	Permukiman	805,69
5	Sawah Irigasi	1.685,83
6	Sungai	49,42
7	Tambak	499,15
JUMLAH		3.207,09

Sumber: DPSDAPR Kabupaten Brebes, 2018

Kawasan Bulakamba-Tanjung merupakan kawasan pengembangan peruntukan industri di Kabupaten Brebes berdasarkan RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039. Hal ini menyebabkan beralihnya kegiatan utama berupa pertanian menjadi kegiatan industri yang memberikan *multiple effect* terhadap sektor perdagangan dan jasa, dan permukiman. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.10.

2.1.4 Kondisi Kawasan Permukiman

Pola perkembangan permukiman berdasarkan perkembangan aktivitas perkotaan terbagi menjadi dua, terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman kampung. Permukiman perkotaan merupakan kawasan berkembang yang dapat dilihat dari kepadatan bangunan yang mendominasi wilayah perkotaan, sedangkan permukiman kampung merupakan kawasan yang masih bercirikan perdesaan dan akan berkembang pada masa yang akan datang. Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kawasan permukiman di Kawasan Tanjung Bulakamba merupakan permukiman kampung yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi permukiman perkotaan. Luas kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Tanjung Bulakamba adalah sebesar 77,23 Ha. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan luas permukiman secara keseluruhan di kawasan Tanjung Bulakamba yang mencapai 805,69 Ha. Meskipun demikian, hal tersebut perlu dikaji berdasarkan data baseline sehingga dapat dilakukan deliniasi kawasan permukiman kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-4 Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Bulakamba-Tanjung

NO	DESA	KECAMATAN	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	LUAS PERMUKIMAN (Ha)	RATIO (%)
1	Bulakamba	Bulakamba	11,23	75,65	14,84%
2	Bulusari	Bulakamba	3,27	85,82	3,81%
3	Kedawung	Tanjung	6,87	16,50	41,64%
4	Kemurang Kulon	Tanjung	5,64	47,26	11,93%
5	Kemurang Wetan	Tanjung	7,32	104,77	6,99%
6	Kramat Sampang	Kersana	3,85	15,41	24,98%
7	Lemahabang	Tanjung	6,35	41,49	15,30%
8	Pejagan	Tanjung	10,45	43,46	24,05%
9	Sengon	Tanjung	3,38	165,30	2,04%
10	Tanjung	Tanjung	8,17	96,29	8,48%
11	Tegongan	Tanjung	4,81	26,50	18,15%
12	Tengguli	Tanjung	5,89	62,23	9,46%
JUMLAH			77,23	780,68	Rata-rata = 15,14%

Sumber: SK Bupati Brebes Nomor 050/678 Tahun 2018, DPSDAPR 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Desa Bulakamba merupakan desa dengan luas kawasan permukiman kumuh tertinggi sebesar 11,23 Ha. Dan desa Bulusari merupakan desa dengan luas kawasan kumuh terkecil hanya sebesar 3,27 Ha saja. Akan tetapi, jika dilihat dari rasio terhadap luas permukiman yang ada, maka Desa Kramatsampang merupakan desa dengan rasio kawasan permukiman kumuh tertinggi yang mencapai 26,21%. Secara keseluruhan, rata-rata rasio kawasan permukiman kumuh terhadap kawasan permukiman yang ada sebesar 12,83%. Rasio pada masing-masing desa berpengaruh terhadap prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh di dalam pembahasan pekerjaan dokumen ini.

2.2 Profil Kawasan Kumuh

Profil kawasan kumuh merupakan hasil baseline yang telah dirangkum menjadi sebuah infografis yang menggambarkan kondisi eksisting lokasi yang diidentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh. Informasi tersebut meliputi peta lokasi kawasan kumuh, informasi geografis, kategori, tipologi, dan karakteristik kawasan permukiman kumuh, sebaran permukiman kumuh, permasalahan umum serta tujuh aspek kekumuhan antara lain: kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, air minum, kondisi drainase, air limbah, persampahan, dan proteksi bahaya kebakaran. Berikut adalah infografis dari kedua belas desa di Kawasan perkotaan Bulakamba-Tanjung:

DESA BULAKAMBA



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 75,65 Ha
 Luas Kumuh = 15,49 Ha
 Latitude = 6°52'20.659"S
 Longitude = 108°56'53'506"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

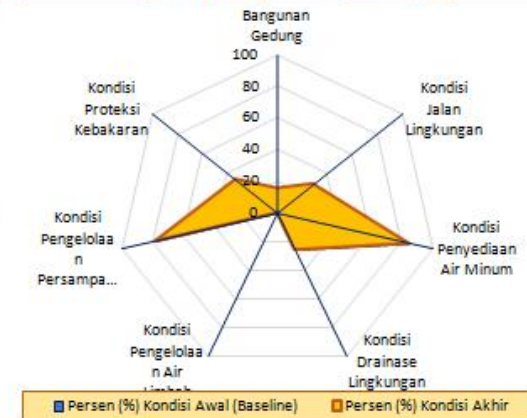
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh di sekitar Pasar Bulakamba
 • Kumuh di koridor jalur pantura

PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sistem drainase yang kurang memadai
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan
- Tingginya jumlah RTLH
- Kurang memadainya sempadan bangunan di jalur pantura

SEBARAN PERMUKIMAN

NO	DESA	RT	RW	LUAS		
				KUMUH AWAL	VALIDASI	WILAYAH
1	Bulakamba	RT 1	RW 1		8,69	473,88
		RT 2	RW 1	11,23	2,67	
		RT 3	RW 1		4,13	



BANGUNAN



Jumlah KK = 275 KK
 Jumlah Bangunan = 204 Unit
 Jumlah RTLH = 93 unit

JALAN LINGKUNGAN



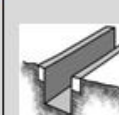
Panjang Jalan Ideal = 2348 m
 Panjang Jalan Rusak = 1352 m

AIR MINUM



193 KK tidak terakses air minum aman
 275 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 0 Ha
 Panjang drainase ideal = 1912 m
 Panjang Drainase Rusak = 1452 m

AIR LIMBAH



3 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
 3 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



275 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
 275 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN

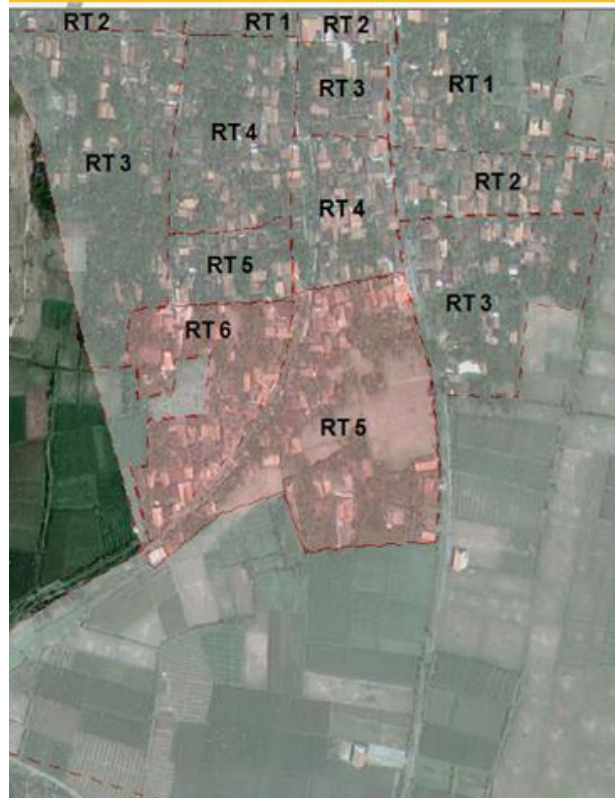


0 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
 136 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada IKK Kec. Bulakamba dan jalur pantura
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA BULUSARI



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 85,82 Ha
Luas Kumuh = 6,02 Ha
Latitude = 6°53'17.568"S
Longitude = 108°56'44'942"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

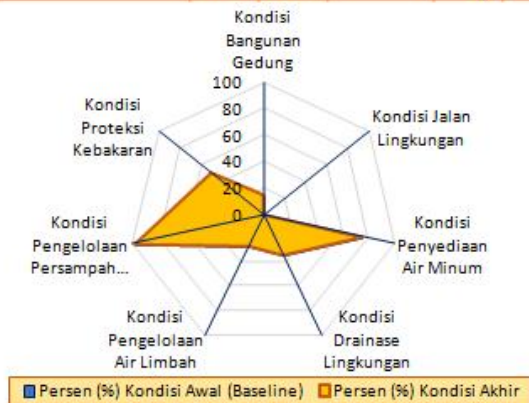
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
Karakteristik :
• Kumuh di sekitar Pasar Bulakamba
• Kumuh di koridor jalur pantura

PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sanitasi resiko tinggi
- Sistem drainase yang kurang memadai
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan
- Kurang memadainya sempadan bangunan di jalur pantura

SEBARAN PERMUKIMAN

N O	DESA	RT	RW	LUAS		
				KUMUH AWAL	VALI DASI	WILAYAH
1	Bulusari	RT 5 RT 6	RW 9 RW 8	3,27	1,92 4,1	396,8



BANGUNAN



Jumlah KK = 193 KK
Jumlah Bangunan = 127 Unit
Jumlah RTLH = 14 unit

JALAN LINGKUNGAN



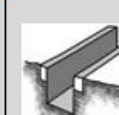
Panjang Jalan Ideal = 2896 m
Panjang Jalan Rusak = 500 m

AIR MINUM



98 KK tidak terakses air minum aman
193 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 0 Ha
Panjang drainase ideal = 2876 m
Panjang Drainase Rusak = 2008,5 m

AIR LIMBAH



50 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
50 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



193 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
188 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN



127 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
0 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Berdekatan IKK Kec. Bulakamba dan jalur pantura
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA TANJUNG



GEOGRAFIS	
Luas Permukiman	= 96,29 Ha
Luas Kumuh	= 5,53 Ha
Latitude	= 6°52'29.288"S
Longitude	= 108°51'7"775"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

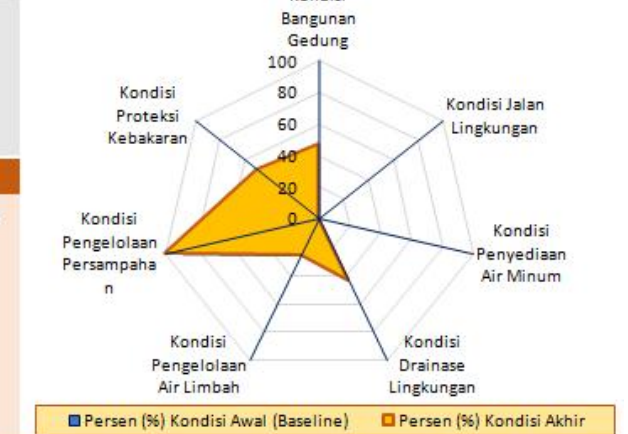
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh di koridor jalur pantura
 • Kumuh di sempadan irigasi




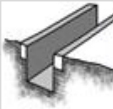



PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sanitasi resiko tinggi
- Tingginya jumlah RTLH
- Rawan genangan (banjir)
- Sistem drainase yang kurang memadai
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan
- Kurang memadainya sempadan bangunan di jalur pantura



SEBARAN PERMUKIMAN						
NO	DESA	RT	RW	LUAS		
				KUMUH AWAL	VALIDASI	WILAYAH
1 Tanjung		RT 4	RW 1		1,21	
		RT 5	RW 1	8,17	2,08	412,92
		RT 6	RW 1		2,24	



BANGUNAN	JALAN LINGKUNGAN	AIR MINUM	DRAINASE
<div></div> <div>Jumlah KK = 298 KK Jumlah Bangunan = 245 Unit Jumlah RTLH = 141 unit</div>	<div></div> <div>Panjang Jalan Ideal = 2425 m Panjang Jalan Rusak = 140 m</div>	<div></div> <div>62 KK tidak terakses air minum aman 0 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya</div>	<div></div> <div>Kws. Rawan genangan = 4 Ha Panjang drainase ideal = 2675 m Panjang Drainase Rusak = 991 m</div>
AIR LIMBAH	PERSAMPAHAN	KEBAKARAN	PERTIMBANGAN LAIN
<div></div> <div>77 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis 77 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis</div>	<div></div> <div>298 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis 298 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis</div>	<div></div> <div>245 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 0 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran</div>	<div><ul style="list-style-type: none">- IKK Kec. Tanjung dan jalur pantura- Kepadatan penduduk tinggi- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi- Pengembangan Kws Industri</div>

DESA KEMURANG WETAN



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 104,77 Ha
 Luas Kumuh = 8,98 Ha
 Latitude = 6°53'33.208"S
 Longitude = 108°53'25'121"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

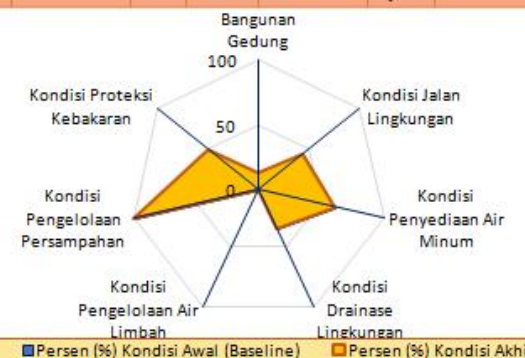
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh perkotaan

PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sanitasi resiko tinggi
- Tingginya jumlah RTLH
- Rawan genangan (banjir)
- Sistem drainase yang kurang memadai
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan
- Kurang memadainya sempadan bangunan di jalur koridor kolektor primer

SEBARAN PERMUKIMAN

NO	DESA	RT	RW	LUAS		WILAYAH
				KUMUH AWAL	VALI DASI	
1	Kemurang Wetan	RT 2	RW 6		1,04	155,45
		RT 3	RW 6		1,72	
		RT 4	RW 6	7,32	2,38	
		RT 5	RW 6		1,83	
		RT 6	RW 6		1,99	



BANGUNAN



Jumlah KK = 312 KK
 Jumlah Bangunan = 224 Unit
 Jumlah RTLH = 89 unit

JALAN LINGKUNGAN



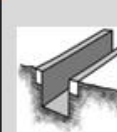
Panjang Jalan Ideal = 3514 m
 Panjang Jalan Rusak = 3129 m

AIR MINUM



237 KK tidak terakses air minum aman
 147 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 1 Ha
 Panjang drainase ideal = 1703 m
 Panjang Drainase Rusak = 103 m

AIR LIMBAH



33 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
 33 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



312 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
 312 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN



160 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
 64 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Kepadatan penduduk tinggi
- Koridor jalan kolektor primer
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA KRAMAT SAMPANG



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 15,41 Ha
 Luas Kumuh = 2,92 Ha
 Latitude = 6°53'42.236"S
 Longitude = 108°51'8"233"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

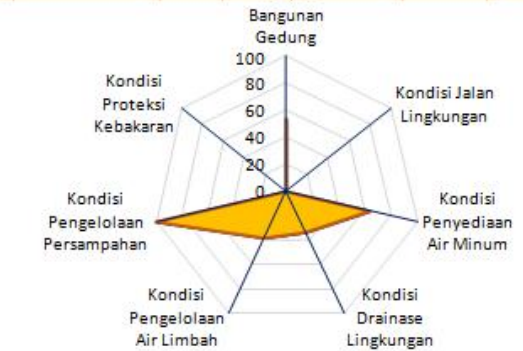
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh perkotaan

PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Sanitasi resiko tinggi
- Tingginya jumlah RTLH
- Rawan genangan (banjir)
- Sistem drainase yang kurang memadai
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakaturan bangunan

SEBARAN PERMUKIMAN

NO	DESA	RT	RW	LUAS		
				KUMUH AWAL	VALIDASI	WILAYAH
1	Kramat Sampang	RT 1 RT 2	RW 3 RW 3	3,85	1,93 0,99	99,23



BANGUNAN



Jumlah KK = 224 KK
 Jumlah Bangunan = 158 Unit
 Jumlah RTLH = 107 unit

JALAN LINGKUNGAN



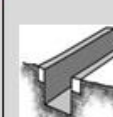
Panjang Jalan Ideal = 877 m
 Panjang Jalan Rusak = 217 m

AIR MINUM



64 KK tidak terakses air minum aman
 224 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 0,8 Ha
 Panjang drainase ideal = 1030 m
 Panjang Drainase Rusak = 728,8 m

AIR LIMBAH



85 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
 85 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



224 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
 224 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN



0 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
 0 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA SENGON



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 165,3 Ha
 Luas Kumuh = 5,85 Ha
 Latitude = 6°53'17.751"S
 Longitude = 108°52'4'511"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh perkotaan
 • Kumuh di bantaran sungai

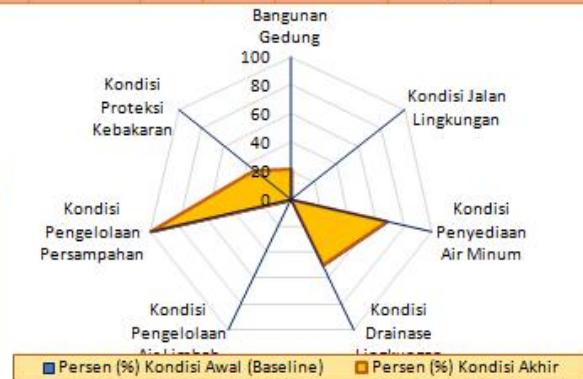
PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Tingginya jumlah RTLH
- Rawan genangan (banjir)
- Sistem drainase yang kurang memadai
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan



SEBARAN PERMUKIMAN

NO	DESA	RT	RW	LUAS		
				KUMUH AWAL	VALIDASI	WILAYAH
1	Sengon	RT 4	RW 2	3,38	1,83	386,12
		RT 5	RW 2		2,17	
		RT 6	RW 2		1,85	



BANGUNAN



Jumlah KK = 231 KK
 Jumlah Bangunan = 170 Unit
 Jumlah RTLH = 53 unit

JALAN LINGKUNGAN



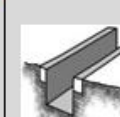
Panjang Jalan Ideal = 1178 m
 Panjang Jalan Rusak = 0 m

AIR MINUM



230 KK tidak terakses air minum aman
 85 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 2,55 Ha
 Panjang drainase ideal = 720 m
 Panjang Drainase Rusak = 420 m

AIR LIMBAH



5 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
 1 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



231 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
 231 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN



113 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
 0 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA TEGONGAN



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 26,50 Ha
 Luas Kumuh = 4,43 Ha
 Latitude = 6°53'29.921"S
 Longitude = 108°53'3'436"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

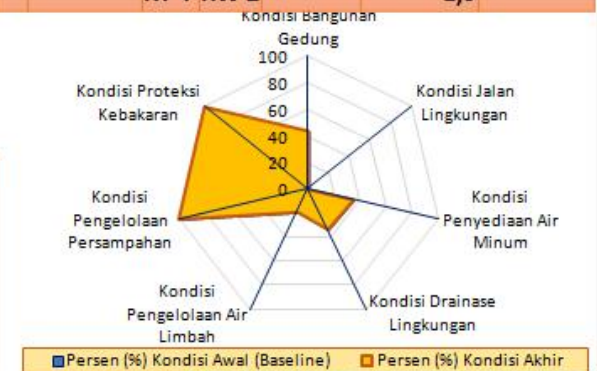
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh perkotaan

PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Tingginya jumlah RTLH
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan

SEBARAN PERMUKIMAN

N O	DESA	RT	RW	LUAS		
				KUMUH AWAL	VALIDASI	WILAYAH
1	Tegongan	RT 2	RW 2		0,96	
		RT 3	RW 2	4,81	1,97	226,18
		RT 4	RW 2		1,5	



BANGUNAN



Jumlah KK = 170 KK
 Jumlah Bangunan = 139 Unit
 Jumlah RTLH = 45 unit

JALAN LINGKUNGAN



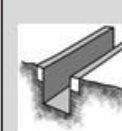
Panjang Jalan Ideal = 1220 m
 Panjang Jalan Rusak = 760 m

AIR MINUM



117 KK tidak terakses air minum aman
 0 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 0 Ha
 Panjang drainase ideal = 190 m
 Panjang Drainase Rusak = 0 m

AIR LIMBAH



31 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
 64 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



170 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
 170 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN



139 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
 139 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA KEDAWUNG



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 16,50 Ha
 Luas Kumuh = 6,77 Ha
 Latitude = 6°55'4.019"S
 Longitude = 108°53'32"082"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

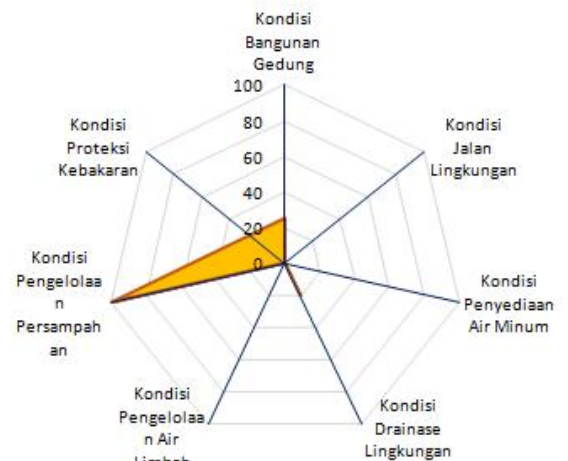
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh perkotaan

PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan

SEBARAN PERMUKIMAN

N O	DESA	RT	RW	LUAS		WILAYAH
				KUMUH AWAL	VALID ASI	
1	Kedawung	RT 1	RW 1	6,87	1,8	69,79
		RT 2	RW 1		1,25	
		RT 3	RW 2		1,7	
		RT 4	RW 2		2,01	



■ Persen (%) Kondisi Awal (Baseline) ■ Persen (%) Kondisi Akhir



BANGUNAN



Jumlah KK = 348 KK
 Jumlah Bangunan = 268 Unit
 Jumlah RTLH = 2 unit

JALAN LINGKUNGAN



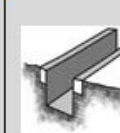
Panjang Jalan Ideal = 1260 m
 Panjang Jalan Rusak = 150 m

AIR MINUM



5 KK tidak terakses air minum aman
 1 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 0 Ha
 Panjang drainase ideal = 590m
 Panjang Drainase Rusak = 0 m

AIR LIMBAH



1 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
 1 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



348 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
 348 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN

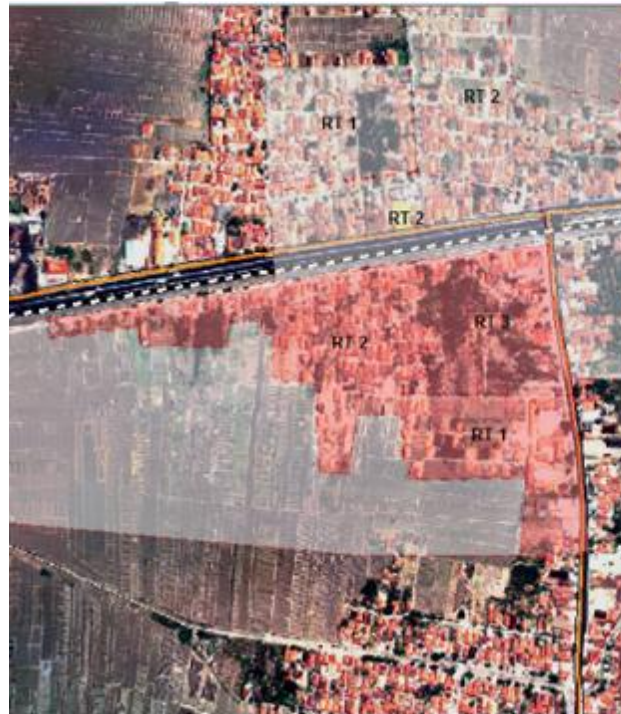


0 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
 135 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA PEJAGAN



GEOGRAFIS

Luas Permukiman = 43,46 Ha
 Luas Kumuh = 10,25 Ha
 Latitude = 6°52'25.121"S
 Longitude = 108°53'1'311"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

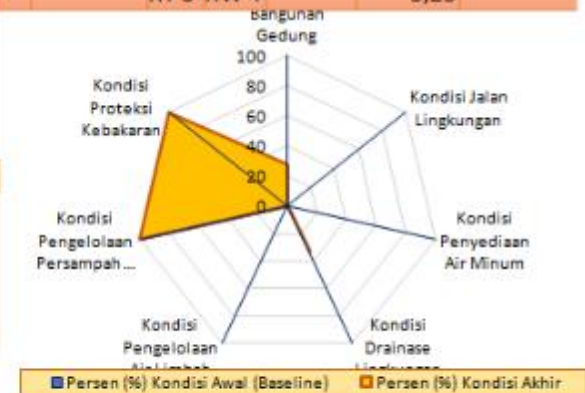
Kategori Kumuh : Kumuh Ringan
 Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
 Karakteristik :
 • Kumuh perkotaan

PERMASALAHAN UMUM

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
- Kepadatan bangunan tinggi & ketidakteraturan bangunan

SEBARAN PERMUKIMAN

N O	DESA	RT	RW	KUMUH AWAL	LUAS	
					VALIDASI	WILAYAH
1	Pejagan	RT 1	RW 4		3,01	92,46
		RT 2	RW 4	10,45	4,19	
		RT 3	RW 4		3,25	



BANGUNAN



Jumlah KK = 236 KK
 Jumlah Bangunan = 204 Unit
 Jumlah RTLH = 28 unit

JALAN LINGKUNGAN



Panjang Jalan Ideal = 1300 m
 Panjang Jalan Rusak = 0 m

AIR MINUM



36 KK tidak terakses air minum aman
 0 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya

DRAINASE



Kws. Rawan genangan = 0 Ha
 Panjang drainase ideal = 188 m
 Panjang Drainase Rusak = 0 m

AIR LIMBAH



21 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis
 26 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis

PERSAMPAHAN



236 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis
 236 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis

KEBAKARAN



204 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
 204 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Kepadatan penduduk tinggi
- Koridor jalur pantura
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

DESA LEMAHABANG

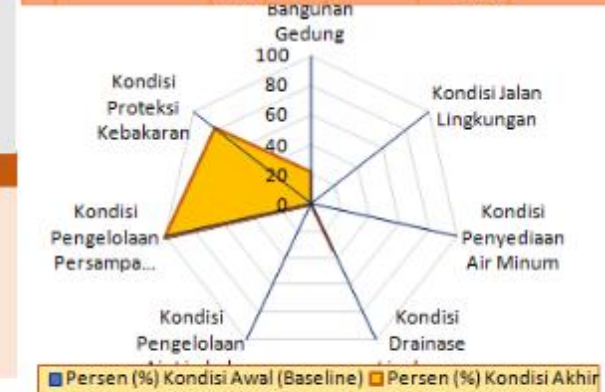


GEOGRAFIS	
Luas Permukiman	= 41,49 Ha
Luas Kumuh	= 9,35 Ha
Latitude	= 6°53'16.972"S
Longitude	= 108°51'38.015"E

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH	
Kategori Kumuh	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
Karakteristik	: <ul style="list-style-type: none"> Kumuh perkotaan

PERMASALAHAN UMUM	
• Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat	
• Kepadatan bangunan tinggi & ketidakaturan bangunan	

SEBARAN PERMUKIMAN						
N O	DESA	RT	RW	LUAS		
				KUMUH AWAL	VALIDASI	WILAYAH
1	Lemahabang	RT 1	RW 3		3,12	
		RT 2	RW 3	6,35	2,71	209,68
		RT 3	RW 3		3,52	



BANGUNAN	JALAN LINGKUNGAN	AIR MINUM	DRAINASE
 <p>Jumlah KK = 236 KK Jumlah Bangunan = 186 Unit Jumlah RTLH = 26 unit</p>	 <p>Panjang Jalan Ideal = 1084 m Panjang Jalan Rusak = 100 m</p>	 <p>4 KK tidak terakses air minum aman 0 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya</p>	 <p>Kws. Rawan genangan = 0 Ha Panjang drainase ideal = 314 m Panjang Drainase Rusak = 0 m</p>
AIR LIMBAH	PERSAMPAHAN	KEBAKARAN	PERTIMBANGAN LAIN
 <p>15 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis 10 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis</p>	 <p>236 KK yang sarpras pengolahan sampahnya tdk sesuai persyaratan teknis 236 KK yang sistem pengolahan sampahnya tdk sesuai standar teknis</p>	 <p>118 Bangunan Tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 186 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kepadatan penduduk tinggi Koridor jalur pantura Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

BAB 3 ANALISIS KAWASAN

3.1 Analisis Prioritasi Penanganan Permukiman Kumuh

Penilaian prioritas kawasan permukiman kumuh diawali dengan membandingkan kondisi luasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Brebes Nomor 050/678 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Brebes dengan luasan yang diidentifikasi berdasarkan hasil survei lapangan dan interpretasi citra kawasan. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi luasan yang sudah dilegalkan berdasarkan surat keputusan Bupati dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil validasi diketahui bahwa terdapat perbedaan luasan kawasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Bulakamba Tanjung yang cukup signifikan dimana perbedaan menunjukkan angka 17,06 Ha lebih luas dibandingkan luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan di SK Bupati.

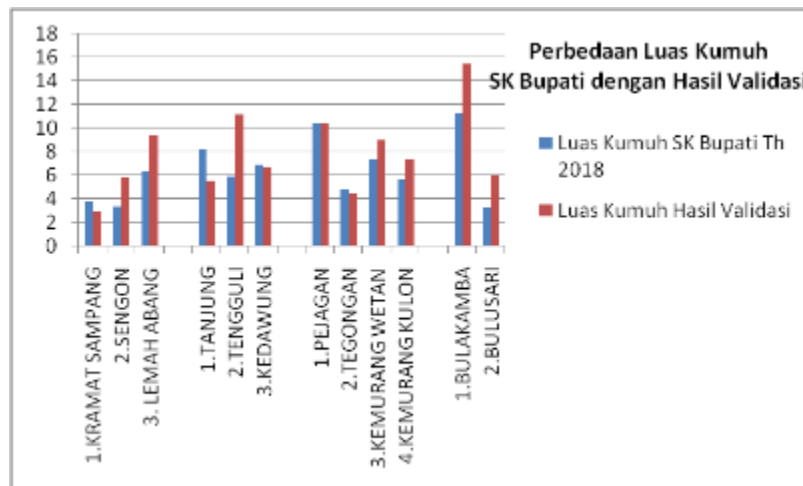
Tabel 3-1 Hasil Validasi Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung

No	Kawasan	Desa	Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati No. 050/678 Tahun 2018		Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Hasil survei dan interpretasi citra		Perbedaan Luas Permukiman Kumuh (Ha)
			Luas (Ha)	Rasio luas kumuh thd luas total	Luas (Ha)	Rasio luas kumuh thd luas total	
1	Tanjung Tengah	1.Kramat Sampang	3,85	4,98%	2,92	3,09%	-0,93
		2.Sengon	3,38	4,37%	5,85	6,20%	2,47
		3. Lemah Abang	6,35	8,21%	9,35	9,91%	3,00
	Jumlah		13,68	17,69%	18,12	19,20%	4,44
2	Tanjung Barat	1.Tanjung	8,17	10,57%	5,53	5,86%	-2,64
		2.Tengguli	5,89	7,62%	11,22	11,89%	5,33
		3.Kedawung	6,87	8,88%	6,77	7,17%	-0,10
	Jumlah		20,93	27,07%	23,52	24,92%	2,59
3	Tanjung Timur	1.Pejagan	10,45	13,51%	10,45	11,07%	0,00
		2.Tegongan	4,81	6,22%	4,43	4,69%	-0,38
		3.Kemurang Wetan	7,32	9,47%	8,98	9,51%	1,66
		4.Kemurang Kulon	5,64	7,29%	7,38	7,82%	1,74
	Jumlah		28,22	36,49%	31,24	33,10%	3,02
4	Bulakamba	1.Bulakamba	11,23	14,52%	15,49	16,41%	4,26
		2.Bulusari	3,27	4,23%	6,02	6,38%	2,75
	Jumlah		14,5	18,75%	21,51	22,79%	7,02
Luas Total			77,33	100%	94,39	100%	17,06

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Adanya perbedaan luas permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati dengan hasil validasi menunjukkan bahwa ternyata luas permukiman kumuh pada kondisi eksisting melebihi luas permukiman kumuh yang ditetapkan secara legal. Namun tidak semua desa menjadi lebih luas permukiman kumuhnya, karena terdapat desa yang justru lebih kecil luasannya dibandingkan yang tercantum dalam SK Bupati. Berikut grafik yang menunjukkan adanya perbedaan luas permukiman kumuh.

Gambar 3-1 Perbedaan Luas Kumuh Berdasarkan SK Bupati dan Hasil Validasi



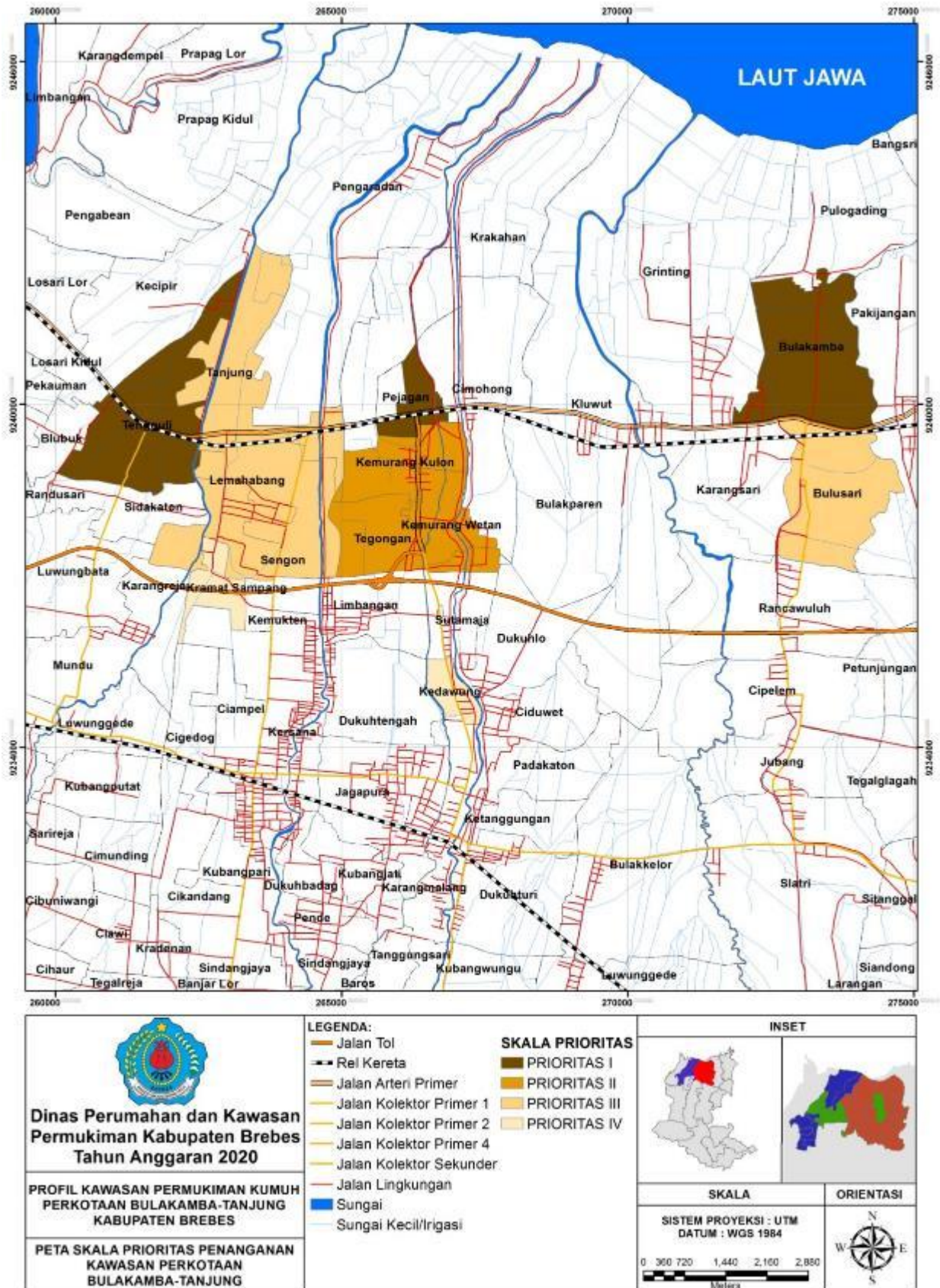
Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 3-1, hasil validasi luas permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung menunjukkan Desa Bulakamba memiliki luasan permukiman kumuh terbesar, sedangkan Desa Kramat Sempang memiliki luasan paling kecil dibandingkan total keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh. Kondisi ini belum dibandingkan dengan luas permukiman di desa tersebut. Rasio luas kumuh desa terhadap total luas kumuh menunjukkan kondisi apabila dilihat secara agregat kawasan perkotaan. Namun, perlu juga dilihat secara mikro pada desa kumuh untuk melihat bagaimana kondisi luas permukiman kumuh di desa tersebut.

Tabel 3-2 Rasio Luas Kumuh Desa terhadap Luas Permukiman Desa

No	Desa	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh Hasil Validasi (Ha)	Luas Permukiman Desa (Ha)	Ratio (%) SK Bupati	Ratio Validasi (%)
a	b	c	d	e	f	g = d/e
1	Bulakamba	Bulakamba	15,49	75,65	14,84%	20,48%
2	Bulusari	Bulakamba	3,27	85,82	3,81%	3,81%
3	Kedawung	Tanjung	6,77	16,50	41,64%	41,03%
4	Kemurang Kulon	Tanjung	7,38	47,26	11,93%	15,62%
5	Kemurang Wetan	Tanjung	8,98	104,77	6,99%	8,57%
6	Kramat Sempang	Kersana	2,92	15,41	24,98%	18,95%
7	Lemahabang	Tanjung	9,35	41,49	15,30%	22,54%
8	Pejagan	Tanjung	10,45	43,46	24,05%	24,05%
9	Sengon	Tanjung	5,85	165,30	2,04%	3,54%
10	Tanjung	Tanjung	5,53	96,29	8,48%	5,74%
11	Tegongan	Tanjung	4,43	26,50	18,15%	16,72%
12	Tengguli	Tanjung	11,22	62,23	9,46%	18,03%
Total			91,64	780,68	Rata-rata = 16,59%	Rata-rata = 15,14%

Gambar 3-2 Peta Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh



Tabel 3-3 Skor dan Tingkat Kekumuhan Per Desa

No.	Nama Desa Kumuh	Skor Kumuh	Kategori Kumuh
1	Bulakamba	26	Kumuh Ringan
2	Bulusari	28	Kumuh Ringan
3	Tanjung	30	Kumuh Ringan
4	Tengguli	32	Kumuh Ringan
5	Kedawung	19	Kumuh Ringan
6	Kemurang Kulon	34	Kumuh Ringan
7	Kemurang Wetan	28	Kumuh Ringan
8	Tegongan	35	Kumuh Ringan
9	Pejagan	31	Kumuh Ringan
10	Sengon	28	Kumuh Ringan
11	Kramat sampang	30	Kumuh Ringan
12	Lemahabang	26	Kumuh Ringan

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Keterangan : Batas Ambang Nilai Tingkat Kekumuhan Tahun 2020

KUMUH BERAT 60 - 80

KUMUH SEDANG 38 - 59

KUMUH RINGAN

16-37

DINYATAKAN TIDAK KUMUH

< 16

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan seluruh desa di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung dikategorikan sebagai Kumuh Ringan. Oleh karena itu, pembobotan berdasarkan Permen PU No 14 tahun 2018 belumlah cukup karena hanya ada satu kategori kumuh di kawasan perkotaan Bulakamba-Tanjung sehingga harus ada faktor lain yang secara signifikan mampu mengurangi kekumuhan yaitu luasan kumuh hasil verifikasi. Karena pengurangan luasan kumuh menjadi target pemerintah di dalam RPJMD Kabupaten Brebes, maka faktor luasan kumuh menjadi pertimbangan yang lebih diprioritaskan..

Prioritasi diperoleh dengan melakukan pembobotan antara skor kekumuhan sebesar 40% dan luas verifikasi kawasan kumuh sebesar 60%. Pembobotan ini bertujuan untuk menghasilkan skala prioritas yang tidak hanya melihat penilaian berdasarkan kriteria aspek kekumuhan saja tetapi juga mempertimbangkan luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung agar penurunan luasan kekumuhan secara signifikan sehingga target pengurangan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Brebes dapat tercapai. Berikut adalah tabel hasil pembobotan dalam rangka memperoleh skala prioritas kawasan:

Tabel 3-4 Skala Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung

Desa	Skor Kumuh	Luas Kumuh Verifikasi (Ha)	Bobot Skor Kumuh	Bobot Luas Kumuh	Skor Total	Skala Prioritas Penanganan
a	b	c	d (b x 40%)	e (c x 60%)	f (d + e)	g
Bulakamba	26	15,49	10,40	9,29	20	I
Tengguli	32	11,22	12,80	6,73	20	I
Pejagan	31	10,45	12,40	6,27	19	I
Kemurang Kulon	34	7,38	13,60	4,43	18	II
Tegongan	35	4,43	14,00	2,66	17	II
Kemurang Wetan	28	8,98	11,20	5,39	17	II
Lemahabang	26	9,35	10,40	5,61	16	III
Tanjung	30	5,53	12,00	3,32	15	III
Bulusari	28	6,02	11,20	3,61	15	III
Sengon	28	5,85	11,20	3,51	15	III
Kramat sampang	30	2,92	12,00	1,75	14	IV
Kedawung	19	6,77	7,60	4,06	12	IV

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis prioritasi kawasan di atas, diperoleh desa yang dikategorikan sebagai

prioritas I antara lain Desa Bulakamba, Desa Tengguli dan Desa Pejagan. Untuk prioritas II yaitu Desa Kemurang Kulon, Desa Tegongan, dan Desa Kemurang Wetan. Prioritas III yaitu Desa Lemahabang, Desa Tanjung, dan Desa Bulusari serta Desa Sengon. Prioritas IV yaitu Desa Kramat Sampang dan Desa Kedawung. Khusus untuk Desa Kedawung, sebenarnya merupakan prioritas V, akan tetapi karena skor kekumuhannya paling rendah dan mendekati batas skor minimal maka dimasukkan ke dalam prioritas ke IV sehingga penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan bulakamba-tanjung dapat dituntaskan di tahun ke empat.

3.2 Analisis Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator ketercapaian yang tercantum dalam setiap kebijakan yang ada perlu dievaluasi bagaimana tingkat ketercapaiannya. Apakah sudah mencapai kondisi ideal atau semakin buruk dari indikator ketercapaian. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan ini menjadi penting karena selain melihat kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh, juga melihat keberhasilan program penanganan permukiman kumuh yang sudah dilakukan. Terlebih, upaya mengatasi permukiman kumuh sudah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat bahwa pada tahun 2019 perlu mengupayakan terciptanya zero kumuh.

Analisis kebijakan dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi indikator ketercapaian arahan kebijakan yang berkaitan dengan penurunan kawasan permukiman kumuh. Ditinjau dari kebijakan yang sudah dituliskan pada Bab I dan Bab III, maka kebijakan yang berkaitan dengan kawasan permukiman kumuh adalah RPJPD, RPJMD dan RP2KPKP.

3.2.1 Evaluasi Kebijakan RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Brebes tahun 2005 – 2025 yang ingin menciptakan Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang madani, maju dan sejahtera. Salah satu dari tiga filosofi visi yang berkaitan dengan kawasan permukiman yaitu visi sejahtera dengan indikator ketercapaian yang berkaitan dengan kawasan permukiman kumuh adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Sedangkan kondisi infrastruktur di kawasan permukiman kumuh justru sangat memprihatinkan, memiliki kualitas yang tidak layak, bahkan terdapat beberapa kawasan yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Indikator ketercapaian yang perlu diwujudkan pada tahun 2025 adalah infrastruktur yang memadai, sedangkan pada kondisi 2020 khususnya di kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung, masih terdapat beberapa desa kumuh yang belum mencapai kondisi infrastruktur yang ideal (memadai secara kuantitas dan baik secara kualitas).

Tabel 3-5 Persentase Ketercapaian Kondisi Infrastruktur di Permukiman Kumuh
Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung

No	Nama Desa Kumuh	Kondisi Bangunan Gedung	Kondisi Jalan Lingkungan	Kondisi Penyediaan Air Minum	Kondisi Drainase Lingkungan	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Kondisi Proteksi Kebakaran	% ketercapaian infrastruktur desa
1	Bulakamba	84,80%	71,21%	14,91%	74,69%	98,91%	21,27%	66,67%	61,78%
2	Bulusari	85,30%	91,37%	24,61%	66,68%	74,09%	1,30%	50,00%	56,19%
3	Tanjung	52,65%	97,11%	89,60%	56,05%	74,16%	0,00%	50,00%	59,94%
4	Tengguli	60,71%	97,66%	23,44%	58,09%	93,12%	7,03%	50,00%	55,72%
5	Kedawung	74,63%	94,05%	99,14%	79,94%	99,71%	0,00%	74,81%	74,61%
6	Kemurang Kulon	84,32%	78,65%	10,36%	49,48%	79,82%	0,00%	50,00%	50,38%
7	Kemurang Wetan	86,76%	55,48%	38,46%	66,67%	89,42%	0,00%	0,00%	48,11%
8	Tegongan	53,33%	97,95%	64,06%	66,67%	57,81%	0,00%	0,00%	48,55%
9	Pejagan	72,39%	92,46%	92,37%	100,00%	90,04%	0,00%	0,00%	63,89%
10	Sengon	78,24%	100,00%	31,82%	49,11%	98,70%	0,00%	66,76%	60,66%
11	Kramat sampang	46,20%	87,63%	35,71%	66,71%	62,05%	0,00%	100,00%	56,90%
12	Lemahabang	78,32%	95,39%	99,15%	66,67%	94,70%	0,00%	18,28%	64,64%
%ketercapaian infrastruktur kawasan		71,47%	88,25%	51,97%	66,73%	84,38%	2,47%	43,88%	58,45%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua desa sudah mencapai indikator ketercapaian infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Kinerja infrastruktur secara keseluruhan memiliki persentase sebesar 58,45%, dimana desa dengan kinerja terbaik adalah Desa Kedawung sebesar 74,61% dan belum mencapai 100% yang merupakan capaian di tahun akhir perencanaan jangka panjang. Sedangkan Desa dengan kinerja infrastruktur terendah adalah Desa Kemurang Wetan yaitu sebesar 48,11%. Mengingat, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Brebes berakhir pada tahun 2025, maka masih ada perencanaan jangka menengah terakhir yang perlu dioptimalkan guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Brebes. Penyediaan infrastruktur yang belum optimal hendaknya dioptimalkan pada perencanaan jangka menengah tahap akhir.

3.2.2 Evaluasi Kebijakan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022

Kebijakan permukiman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 dijabarkan melalui visi dan misi. Visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 adalah **“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.”** Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. Sedangkan pada misi, kebijakan permukiman tertuang pada misi **“Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.”** Tujuan dari misi tersebut adalah: Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha, dengan indikator tujuan adalah Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah. Dengan sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat
- 2) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik ;
- 3) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat;
- 4) Meningkatnya cakupan sanitasi;
- 5) Meningkatnya cakupan drainase
- 6) Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan
- 7) Menurunnya kawasan permukiman kumuh.

Berkaitan dengan sasaran penurunan kawasan permukiman kumuh, maka dapat dievaluasi kinerja tahun 2020 dibandingkan tahun awal perencanaan apakah memang terdapat penurunan kawasan permukiman kumuh atau tidak. Berikut adalah evaluasi indikator ketercapaian arahan RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 dengan kondisi tahun 2020 mengenai kawasan permukiman kumuh khususnya di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung,

Tabel 3-6 Evaluasi Capaian Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung

Tujuan	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha				
Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Arahan RPJMD tahun 2020 (%)	Kondisi Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung Tahun 2020	Kondisi Ketercapaian
Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat	Rasio layak huni (%)	86,58	71,47	Tidak Tercapai
	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio jalan baik (%)	80	88,25	Tercapai
	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak (%)	89,55	51,97	Tidak Tercapai
	Meningkatnya cakupan sanitasi	Cakupan akses jamban (%)	72,80	84,38	Tercapai
	Meningkatnya cakupan drainase	Persentase kawasan bebas banjir perkotaan (%)	96	66,73	Tidak Tercapai
	Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan	Persentase penanganan	24,66	2,47	Tidak Tercapai

Tujuan	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha				
Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Arahan RPJMD tahun 2020 (%)	Kondisi Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung Tahun 2020	Kondisi Ketercapaian
		persampahan (%)			

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari semua infrastruktur lingkungan yang menjadi sasaran peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah, hanya sasaran cakupan jalan yang mampu mencapai indikator sasaran di tahun 2020. Berdasarkan arahan RPJMD tahun 2020 menyebutkan bahwa cakupan jalan dalam kondisi baik harus mencapai 80% dari total jumlah panjang jalan, dan pada kondisi eksisting mencapai 88,52% atau melebihi target sasaran. Meskipun pada RPJMD target tersebut merupakan target untuk Jalan nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa dan Jalan Tol, akan tetapi target tersebut digunakan pada laporan ini sebagai asumsi ukuran ketercapaian yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes.

3.3 Analisis Strategi Penanganan

Sebelum merumuskan strategi penanganan yang sesuai pada masing-masing desa kumuh, maka dibutuhkan analisis SWOT guna mengetahui potensi dan permasalahan dari sudut pandang internal dan eksternal. Hasil identifikasi isu strategis serta potensi yang ada di desa kumuh ini diperoleh dari hasil analisis sebelumnya. Berikut adalah tabel SWOT mengenai kawasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung:

Tabel 3-7 SWOT Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN/STRENGTHS (S)	KELEMAHAN/WEAKNESS (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai besar kawasan permukiman kumuh Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung memiliki akses yang cukup mudah. 2. Kondisi infrastruktur jalan memiliki kondisi baik. 3. Lokasi yang strategis, yaitu koridor pantura dan koridor exit toll pejalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak kondisi rumah yang semi permanen 2. Drainase belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis 3. Sebagai besar kawasan belum terjangkau pelayanan air minum 4. Sebagai besar masih mengelola sampah secara konvensional 5. Pengelolaan sampah belum terpadu 6. Sarana prasarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi standar an persyaratan teknis 7. Sebagai besar belum memiliki saluran drainase yang terintegrasi ke saluran utama. 8. Sebagian besar bangunan gedung belum memiliki sistem proteksi kebakaran
PELUANG/OPPPORTUNITY (O)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya upaya penanganan kekumuhan yang tertuang dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Brebes. 2. Adanya Bantuan perencanaan penanganan permukiman kumuh di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Adanya dukungan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Brebes terkait penanganan permukiman kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan. 4. Meskipun sebagai kawasan perkotaan, tetapi masyarakatnya tergolong kelompok masyarakat <i>gemeinschaft</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah ada dokumennya untuk mendorong mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh. 2. Pemanfaatan bantuan dari pemerintah untuk penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Brebes. 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan permukiman dan lingkungan permukiman melalui program pemberdayaan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh menuju permukiman yang layak huni. 2. Mengedukasi masyarakat dengan menyebarluaskan informasi dan sosialisasi tentang hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. 3. Pembangunan drainase yang terintegrasi dengan drainase induk disertai dengan saluran pembuangan ke luar kawasan yang terintegrasi. 4. Pembangunan jaringan sanitasi dan limbah terpadu 5. Pengoptimalan pelayanan air minum dan mempermudah akses pelayanan air minum 6. Sosialisasi pengelolaan persampahan

		<p>dengan 3R kepada masyarakat dan upaya pelaksanaannya di kawasan kumuh</p> <p>7. Peningkatan kualitas bangunan gedung dan pemberian sarana prasarana proteksi kebakaran dengan memanfaatkan bantuan pemerintah</p>
<p>TANTANGAN/THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya amanat untuk mencapai kondisi 0% kawasan permukiman kumuh (RPJMN 2015-2019). 2. Terdapat 12desa dengan status kumuh ringan 3. Pengembangan kawasan industri yang dapat berpengaruh terhadap kebutuhan hunian sewa 4. Adanya kemungkinan meluasnya kondisi genangan pada beberapa desa 	<p>STRATEGI (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan posisi strategis Kecamatan Tanjung dan Bulakamba sebagai kawasan koridor pantura dan koridor exit toll pejalan sebagai kawasan perkotaan yang berkembang 2. Penyediaan permukiman yang layak huni melalui perbaikan/pemugaran rumah disertai penyediaan infrastruktur. 3. Penanganan permukiman kumuh melalui penataan dan pengaturan kawasan secara bertahap. 4. Peningkatan kualitas drainase lingkungan. 	<p>STRATEGI (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lingkungan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur permukiman yang layak huni, sesuai dengan standar permukiman. 2. Penyediaan regulasi dan sosialisasi permukiman kumuh sebagai permukiman yang berkelanjutan. 3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 4. Penegakan aturan garis sempadan bangunan, KDB,KDH, dan KLB 5. Pengoptimalan lahan permukiman kumuh untuk pengembangan permukiman yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. 6. Mengedukasi masyarakat dengan menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, secara garis besar strategi yang dibutuhkan antara lain,

1. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah :
 - a. Percepatan penyusunan dokumen penanganan kawasan permukiman kumuh
 - b. Pemanfaatan bantuan Pemerintah untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh
 - c. Penyusunan regulasi kawasan permukiman berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi kawasan.
 - d. Percepatan penataan kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman berkelanjutan
2. Pembangunan dan Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan sesuai dengan standar teknis
 - a. Peningkatan kualitas bangunan gedung
 - b. Peningkatan kualitas jalan lingkungan
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih
 - d. Pembangunan dan Peningkatan kualitas saluran pembuangan air limbah
 - e. Pembangunan dan Peningkatan kualitas saluran drainase
 - f. Pembangunan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan dengan 3R
 - g. Penyusunan regulasi penyediaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung
3. Optimalisasi peran masyarakat dalam perbaikan kawasan
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan kawasan
 - b. Sosialisasi tentang hidup sehat dan peduli lingkungan

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung memiliki kelebihan dan kekurangan dalam upayanya mengurangi kekumuhan. Terdapat beberapa poin yang perlu digarisbawahi antara lain:

1. Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung secara umum memiliki permukiman kumuh dengan kategori Kumuh Ringan.
2. Berdasarkan hasil validasi di lapangan terjadi perbedaan luas kekumuhan di Kawasan Perkotaan Tanjung-Bulakamba dari 77,33 Ha berdasarkan SK Bupati nomor 050/678 Tahun 2018 menjadi seluas 94,39 Ha berdasarkan hasil verifikasi luasan kumuh tahun 2020. Artinya terdapat selisih sebesar 17,06 Ha.
3. Aspek yang memiliki kualitas terburuk adalah aspek pengelolaan persampahan dan proteksi terhadap bahaya kebakaran, serta aspek penyediaan air minum dan air bersih sedangkan aspek yang memiliki kondisi cukup baik adalah aspek kondisi jalan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilan aspek tersebut dalam memenuhi target capaian infrastruktur tahun 2020.
4. Desa yang mengalami peningkatan luas kumuh pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan luas kumuh yang tercantum dalam SK Bupati nomor 050/678 Tahun 2018 antara lain Desa Sengon, Desa Lemahabang, Desa Tengguli, Desa Kemurang Kulon, Desa Kemurang Wetan, Desa Bulakamba, dan Desa Bulusari.
5. Desa yang mengalami penurunan luas kumuh pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan luas kumuh yang tercantum dalam SK Bupati nomor 050/678 Tahun 2018 antara lain Desa Kramatsampang, Desa Tanjung, Desa Kedawung, dan Desa Tegongan.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan antara lain:

1. Perlu adanya revisi terhadap SK Bupati Nomor 050/678 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Brebes pada Kawasan Perkotaan Bulakamba-Tanjung.
2. Perlu adanya keberlanjutan target kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh mengingat target RPJMD Kabupaten Brebes akan berakhir pada tahun 2022 sehingga diharapkan penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dituntaskan.
3. Skema penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan skala prioritas kawasan yang telah ditetapkan khususnya pada desa-desa yang memiliki luasan kumuh terbesar.
4. Program penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan menitikberatkan aspek kekumuhan yang memiliki nilai terendah yaitu pengelolaan sampah dan proteksi terhadap bahaya kebakaran serta aspek penyediaan air minum dan air bersih.
5. Perlu adanya upaya untuk mendorong pemerintah desa di dalam melakukan pembangunan desa yang tepat sasaran di dalam penanganan kawasan permukiman kumuh melalui sosialisasi 7 aspek kumuh
6. Perlu adanya koordinasi dan elaborasi antar *Stakeholder* (SKPD) di Kabupaten Brebes di dalam upaya penanganan kawasan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Kersana dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Tanjung dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Bulakamba dalam Angka.
- Budihardjo, E. (1992). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Dianingrum, A., Faqih, M., & Septanti, D. (2017). Development of Kampung Improvement Program in Surabaya, Indonesia. *The International Journal of Engineering and Science*, 06(07), 41–47. <https://doi.org/10.9790/1813-0607014147>
- Neuman, Lawrence. 2017. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Indeks
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2004 tentang Garis Sempadan
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039;
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pokja Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2016. Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Brebes.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2020-2024
- Silas, J. (1992). Government-community partnerships in kampung improvement programmes in Surabaya. *Environment and Urbanization*, 4(2), 33–41. <https://doi.org/10.1177/095624789200400204>
- SK Bupati Brebes Nomor 050/678 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Brebes
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap	Mustovia Azahro		
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli/IIIB		
3	NIP/NIK/NIDN	120150503/0402079101		
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Pemalang, 2 Juli 1991		
5	Alamat Rumah	Griya Asri Pasirwangi Blok D/8 Ujung Berung, Bandung		
6	Nomor Telp/Fax	-		
7	Nomor HP	0821-1169-1525		
8	Alamat Kantor	Kampus Institut Teknologi Nasional, Jl. PKH. Mustopha No.23, Bandung 40124		
9	Nomor Telp/Fax	Phone: +62-22-7272215, Fax: +62-227202892		
10	Alamat e-mail	Mustovia.azahro[at]itenas.ac.id		
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 19 orang	S2= - orang	S3= - orang
12	Matakuliah yang diampu	Perencanaan Partisipatif		

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1	Program	S1	S2	S3
2	Nama PT	Universitas Diponegoro Semarang	Universitas Diponegoro Semarang	-
3	Bidang Ilmu	Perencanaan Wilayah dan Kota	Pembangunan Wilayah dan Kota-Perancangan Kota	-
4	Tahun Masuk	2009	2013	-
5	Tahun Lulus	2013	2014	-
6	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Kajian Kehidupan Masyarakat Kampung Lama Sebagai Potensi Keberlanjutan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gabahan Semarang	Kajian Keterikatan Tempat di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kelurahan Gabahan dan Kelurahan Jabungan Semarang)	-
7	Nama Pembimbing/Promotor	Ir. Nany Yuliasuti, MT.	Sri Rahayu, S.Si., M.Si.	-

III. PENGALAMAN MENGAJAR

Tahun	Mata Kuliah	Jenjang	Semester	Prodi/Fakultas
15/16	Studio Pengelolaan Wilayah & Kota	S1	Ganjil	PWK/FTSP
15/16	Perencanaan Tapak	S1	Ganjil	PWK/FTSP
15/16	Studio Perencanaan Wilayah & Kota	S1	Genap	PWK/FTSP
16/17	Studio Pengelolaan Wilayah & Kota	S1	Ganjil	PWK/FTSP
16/17	Perencanaan Tapak	S1	Ganjil	PWK/FTSP
16/17	Proses Perencanaan	S1	Genap	PWK/FTSP

Tahun	Mata Kuliah	Jenjang	Semester	Prodi/Fakultas
16/17	Perencanaan Kota	S1	Genap	PWK/FTSP
17/18	Sosiologi Kota	S1	Ganjil	PWK/FTSP
17/18	Perancangan Kota	S1	Ganjil	PWK/FTSP
17/18	Proses Perencanaan	S1	Genap	PWK/FTSP
17/18	Konservasi Kawasan Perkotaan	S1	Genap	PWK/FTSP
18/19	Perancangan Kota	S1	Ganjil	PWK/FTSP
18/19	Metode Penelitian Lanjut	S1	Ganjil	PWK/FTSP
18/19	Proses Perencanaan	S1	Genap	PWK/FTSP
18/19	Konservasi Kawasan Perkotaan	S1	Genap	PWK/FTSP
19/20	Studio Perencanaan & Pengelolaan II	S1	Ganjil	PWK/FTSP
19/20	Perencanaan Kota	S1	Genap	PWK/FTSP
19/20	Perencanaan Partisipatif	S1	Genap	PWK/FTSP
19/20	Konservasi Kawasan Perkotaan	S1	Genap	PWK/FTSP

IV. PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah(Rp)
1	2013	Kajian Kehidupan Masyarakat Kampung Lama Sebagai Potensi Keberlanjutan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gabahan Semarang	Mandiri	-
2	2013	<i>Space For Life of Urban Kampong Community : Togetherness in the use of Space</i>	Mandiri	-
3	2014	Kajian Keterikatan Tempat di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kelurahan Gabahan dan Kelurahan Jabungan Semarang)”	Mandiri	-
4	2016	<i>Building Resilience, Tackling the Challenge of Climate Change: A Case Study of Rural Communityin Kaliwlingi Village</i>	Mandiri	-
5	2017	<i>Challenges of Climate Change: Resilience Effort in Rural Communities of Kaliwlingi Village</i>	Mandiri	-
6	2017	Identifikasi Kehidupan Bertetangga Di Kampung Kreatif Dago Pojok	Mandiri	-
7	2018	<i>Green Heritage And The Degree Of Intervention</i>	Mandiri	-
8	2019	Aktivitas Masyarakat Kelurahan Braga dalam Peningkatan Kualitas Permukiman	Mandiri	-

V. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah(Rp)
1	2016	Pemetaan Potensi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Jawa Barat	BP3IPTEK JABAR	8 juta
2	2017	Sosialisasi Penataan Desa Mekarmanik, Pemetaan Potensi dan Permasalahan serta Penyepakatan MoU	P2M ITENAS	3.220.000
3	2018	Kegiatan Bina Desa Mekarmanik : Pemetaan Kebutuhan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemeliharaan Desa	LP2M ITENAS	5.000.000
4	2018	Kegiatan Bina Desa Mekarmanik : Penyusunan Dokumen Rencana Desa Mekarmanik	LP2M ITENAS	3.000.000
5	2019	Fasilitasi Penyusunan Database Permukiman Kumuh Kabupaten Brebes	Dinas Perumahan dan	1.000.000

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah(Rp)
			Kawasan permukiman Kab Brebes	

VI. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Vol./No.	Nama Jurnal
1	2013	Kajian Kehidupan Masyarakat Kampung Lama Sebagai Potensi Keberlanjutan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gabahan Semarang	2 (3)	Teknik PWK
2	2014	Kajian Keterikatan Tempat di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kelurahan Gabahan dan Kelurahan Jabungan Semarang)	10 (4), 466-475	Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota
3	2017	<i>Challenges of Climate Change: Resilience Efforts in Rural Communities of Kaliwlingi Village.</i>	5 (1)	Jurnal Wilayah dan Lingkungan

VII. SEMINAR

No	Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/ Pembicara
1	2013	<i>The 2nd International Conference on Regional Development, Sustainable Development (ICRD): Conceptual Progress and Practical Challenges</i>	UNDIP	Presenter
2	2016	<i>The 3rd International Conference on Regional Development, Sustainable Development (ICRD): Conceptual Progress and Practical Challenges</i>	UNDIP	Presenter
3	2018	<i>Seminar Nasional Pengembangan Kampung Kreatif di Perkotaan</i>	HMPL ITENAS	Narasumber
4	2020	<i>Geospatial Webinar Series : Satu Data dan Implementasinya dalam Penanganan Covid-19</i>	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Peserta

VIII. PELATIHAN PROFESIONAL

No	Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu
1				

IX. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit

X. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	No Pendaftaran/ Setifikat

XI. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandung, Juni 2020

Dosen,
ttd

Mustovia Azahro, S.T., M.T.
120150503/0402079101